

# **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FREKUENSI RAPAT KOMITE AUDIT**



## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**NOVIANA PRIHARTANTININGTYAS**

**NIM. 12030111130081**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

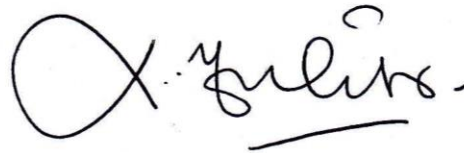
**2015**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Noviana Prihartantiningtyas  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130081  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi  
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI FREKUENSI RAPAT  
KOMITE AUDIT**  
Dosen Pembimbing : Agung Juliarto, S.E., M.Si., Akt, Ph.D

Semarang, 27 April 2015

Dosen Pembimbing,



Agung Juliarto, S.E., M.Si., Akt, Ph.D

NIP. 19730722 200212 1002

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Noviana Prihartantiningtyas

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130081

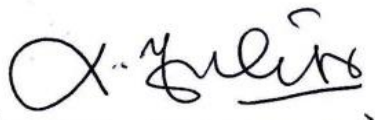
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI FREKUENSI RAPAT  
KOMITE AUDIT**

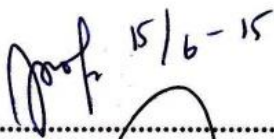
Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 12 Mei 2015

### Tim Penguji :

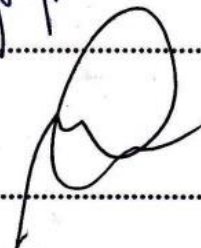
1. Agung Juliarto, S.E., M.Si., Akt, Ph.D

  
(.....)

2. Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt

  
(.....)

3. Faisal, S.E., M.Si., Akt, Ph.D

  
(.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Noviana Prihartantiningtyas, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Frekuensi Rapat Komite Audit**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 27 April 2015

Yang membuat pernyataan,

Noviana Prihartantiningtyas

NIM. 12030111130081

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Tugas kita bukanlah untuk berhasil.  
Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba itulah  
kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil  
(Mario Teguh)

“Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih...  
berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan!  
Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan  
jerih payahmu tidak sia-sia”  
(1 Kor 15:58)

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Papa, Mama, dan Kakak ku tersayang

Sahabat dan teman-teman ku Akuntansi Undip 2011

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine factors affecting the frequency of audit committee meetings. Frequency of meetings reflects the activities of the audit committee which are often used as measure of its effectiveness. This study uses ownership concentration, insider ownership, board size, and the proportion of independent directors as variables expected to affect the frequency of audit committee meetings. This study based on research Greco (2011) by making modifications in the study. The purpose of modifying the research is to gain an overview of recent research object. By using the data of 2013 is expected to reflect the conditions that exist today.*

*Population of this study are non-financial companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) 2013. The sampling method used is the method of probability sampling technique using random sampling. Total sample of 85 companies is used in analysis. Data are analyzed using multiple regression analysis.*

*The results of this study indicate that insider ownership has a negative effect on audit committee meeting frequency whereas proportion of independent commissioner has a positive effect on audit committee meeting frequency. However, this study does not find negative effects of the ownership concentration and board size on the frequency of audit committee meetings. The implications of this research is that in Indonesia, insider ownership and the proportion of independent commissioners may cause a decrease or an increase in the frequency of audit committee meetings.*

*Keywords: frequency of audit committee meetings, ownership concentration, insider ownership, board size, independent commissioners*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi rapat komite audit. Frekuensi rapat mencerminkan aktifitas komite audit dimana sering digunakan sebagai ukuran efektifitas komite audit. Penelitian ini menggunakan konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen sebagai variabel yang diduga mempengaruhi frekuensi rapat komite audit. Penelitian ini mengacu pada penelitian Greco (2011) dengan melakukan modifikasi pada tahun penelitian. Tujuan memodifikasi tahun penelitian adalah untuk memperoleh gambaran terkini atas objek penelitian. Dengan menggunakan data tahun 2013 diharapkan dapat mencerminkan kondisi yang ada saat ini.

Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013. Metode sampling yang digunakan adalah metode probabilitas dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *random sampling*. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel adalah 85 perusahaan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan oleh pihak internal perusahaan berpengaruh negatif terhadap frekuensi rapat komite audit dan proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap frekuensi rapat komite audit. Namun, hasil penelitian ini tidak menemukan pengaruh negatif antara konsentrasi kepemilikan dan ukuran dewan komisaris terhadap frekuensi rapat komite audit. Implikasi dalam penelitian ini adalah bahwa di Indonesia, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan dan proporsi komisaris independen dapat menyebabkan penurunan maupun peningkatan frekuensi rapat komite audit.

Kata Kunci : frekuensi rapat komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan, ukuran dewan komisaris, komisaris independen

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FREKUENSI RAPAT KOMITE AUDIT”**. Penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. Muchammad Syafruddin, S.E., M.Si, Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Agung Juliarto, S.E., M.Si, Akt, Ph.D selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen wali yang telah memberikan nasihat dan arahan selama proses perwalian.

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
6. Kedua orang tua tercinta, Papa Kusprihadi dan Mama M.A. Sri Kisyati yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dan doa hingga penulis dapat menyelesaikan studi S1.
7. Kakak tersayang, Diana Permatasari yang telah memberikan bantuan, semangat, dan motivasi bagi penulis.
8. Seluruh keluarga besar ku yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada penulis.
9. Teman-teman bimbingan Pak Agung (Lala, Kirana, Debra, Nia, Herdian) yang memberikan dukungan dan bantuan.
10. Teman-teman *Comel's* (Umi, Rusti, Nindi, Arin, Nidza, Karin, Anis, Rita, Reni, Tsara, Rensi, Aris, Sule, Bayu, Nizar) yang telah memberikan semangat, dukungan, dan bantuan dalam bentuk apa pun.
11. Seluruh teman-teman Akuntansi 2011 yang telah memberikan semangat dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 27 April 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	13
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	13
2.1.1 Teori Agensi .....	13
2.1.2 <i>Good Corporate Governance</i> .....	15
2.1.3 Komite Audit.....	17
2.1.3.1 Aktifitas Komite Audit .....	20
2.1.4 Struktur Kepemilikan .....	20
2.1.4.1 Konsentrasi Kepemilikan.....	21
2.1.4.2 Kepemilikan oleh Pihak Internal Perusahaan ( <i>Insider Ownership</i> ).....	22
2.1.5 Ukuran Dewan Komisaris .....	23
2.1.6 Proporsi Komisaris Independen .....	24

2.1.7	Penelitian Terdahulu .....	25
2.2	Kerangka Pemikiran .....	29
2.3	Hipotesis .....	32
2.3.1	Konsentrasi Kepemilikan dan Frekuensi Rapat Komite Audit	32
2.3.2	Kepemilikan oleh Pihak Internal Perusahaan dan Frekuensi Rapat Komite Audit .....	33
2.3.3	Ukuran Dewan Komisaris dan Frekuensi Rapat Komite Audit	34
2.3.4	Proporsi Komisaris Independen dan Frekuensi Rapat Komite Audit.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....		36
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	36
3.1.1	Variabel Dependen .....	38
3.1.2	Variabel Independen.....	38
3.1.2.1	Konsentrasi Kepemilikan.....	39
3.1.2.2	Kepemilikan oleh Pihak Internal Perusahaan ( <i>Insider Ownership</i> ).....	39
3.1.2.3	Ukuran Dewan Komisaris.....	40
3.1.2.4	Proporsi Komisaris Independen.....	40
3.1.3	Variabel Kontrol.....	41
3.1.3.1	Ukuran Perusahaan .....	41
3.1.3.2	<i>Leverage</i> .....	41
3.1.3.3	Umur Perusahaan.....	42
3.1.3.4	Kinerja Perusahaan pada Periode Sebelumnya.....	42
3.2	Populasi dan Sampel .....	43
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	43
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	44
3.5	Metode Analisis.....	44
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	44
3.5.2	Analisis Regresi Berganda .....	45
3.5.3	Uji Asumsi Klasik .....	46
3.5.3.1	Uji Normalitas .....	46

3.5.3.2 Uji Multikolinieritas .....	47
3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	48
3.5.4 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	48
3.5.5 Uji Signifikansi Simultan (uji Statistik F).....	49
3.5.6 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	49
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....</b>	<b>51</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	51
4.2 Analisis Data .....	52
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	52
4.2.2 Analisis Regresi.....	56
4.2.3 Uji Asumsi Klasik .....	58
4.2.3.1 Uji Normalitas .....	58
4.2.3.2 Uji Multikolinieritas .....	59
4.2.3.3 Uji Heterokedastisitas .....	61
4.2.4 Uji Hipotesis .....	63
4.2.4.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	63
4.2.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) .....	64
4.2.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) .	65
4.3 Pembahasan .....	69
4.3.1 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Frekuensi Rapat Komite Audit.....	69
4.3.2 Pengaruh Kepemilikan oleh Pihak Internal Perusahaan terhadap Frekuensi Rapat Komite Audit .....	71
4.3.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Frekuensi Rapat Komite Audit.....	72
4.3.4 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Frekuensi Rapat Komite audit.....	73
4.3.5 Variabel Kontrol .....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
5.1 Simpulan.....	77
5.2 Keterbatasan .....	78

5.3 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	80
LAMPIRAN.....	82

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 3.1 Variabel, Dimensi, Indikator, dan Skala Pengukuran .....	36
Tabel 4.1 Kriteria Pemilihan Sampel .....	51
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif .....	52
Tabel 4.3 Hasil Regresi .....	56
Tabel 4.4 Uji Kolmogorov-Smirnov .....	59
Tabel 4.5 Uji Multikolinieritas .....	60
Tabel 4.6 Uji Glejser .....	62
Tabel 4.7 Koefisien Determinasi .....	63
Tabel 4.8 Hasil Uji F .....	64
Tabel 4.9 Hasil Uji t .....	65
Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis .....	69

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas.....	61

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Sampel Perusahaan .....	82
Lampiran B Hasil Output SPSS .....	85
Lampiran C Uji Glejser .....	91

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Saat ini keberadaan komite audit telah menjadi bagian dari *Good Corporate Governance* (GCG). Keberadaan komite audit telah diwajibkan secara legal dimiliki oleh suatu perusahaan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Adanya kasus perusahaan besar yang mengalami kebangkrutan akibat perusahaan tidak efektif dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga setiap perusahaan diwajibkan untuk memiliki komite audit.

GCG muncul sebagai suatu standar bagi perusahaan untuk dapat melindungi para pemegang sahamnya. Salah satu komponen penting GCG adalah dewan komisaris. Dewan komisaris bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan dan mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Dewan komisaris membentuk komite-komite yang salah satunya adalah komite audit yang digunakan dalam mengawasi perusahaan. Dewan komisaris bersama alat bantuannya, komite audit, berperan penting dalam mengawasi perusahaan untuk kepentingan para investor (Restria dan Cahyonowati, 2014).

Dalam mewujudkan GCG di Indonesia, pemerintah mewajibkan perusahaan untuk memiliki komite audit. Kewajiban perusahaan publik di Indonesia untuk memiliki komite audit diatur dalam Peraturan Nomor IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja

Komite Audit. Selain itu, kewajiban perusahaan khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memiliki komite audit juga diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002 tentang Pembentukan Komite Audit bagi BUMN dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Menurut Peraturan Nomor: IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BL/2012, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit memiliki peran penting untuk mengawasi dan memantau proses pelaporan keuangan perusahaan, pengendalian internal, dan audit eksternal.

Komite audit yang efektif juga dapat membantu meningkatkan transparansi di pasar sekuritas, menghasilkan perlindungan yang lebih baik dari pemegang saham dan peningkatan nilai perusahaan (McMullen dan Raghunandan, 1996; Pwc, 1999; DeZoort *et al.*, 2002 dalam Yin *et al.*, 2012). Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab, komite audit dapat mengadakan rapat secara periodik sebagaimana ditetapkan oleh komite audit sendiri. Rapat komite audit merupakan sarana untuk mendiskusikan masalah yang signifikan yang telah dibahas sebelumnya dengan manajemen dan untuk survei akurasi pelaporan keuangan (Gantyowati dan Nugraheni, 2014). Oleh karena itu, frekuensi rapat komite audit dapat menunjukkan tingkat kerajinan anggota komite audit dalam melakukan pengawasan perusahaan (Raghunandan dan Rama, 2007).

Keberhasilan komite audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dipengaruhi oleh berbagai keragaman sumber daya anggota komite audit. Keragaman tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek seperti latar belakang pendidikan, kompetensi, pengalaman dalam bisnis dan industri, karir dan pengalaman kerja. Selain itu, kinerja komite audit juga tidak terlepas dari aktifitas yang dilakukan oleh anggota komite audit yaitu jumlah rapat yang dilakukan oleh anggota komite audit dalam setiap tahun serta komitmen waktu yang dimiliki oleh anggota komite audit tersebut (Rustiarini, 2012). Tidak adanya regulasi yang menyebutkan secara eksplisit frekuensi rapat komite audit dalam tiap periodenya sehingga tidak terdapat pedoman bagi komite audit terkait rapat yang dilakukan. Jumlah rapat komite audit juga dianjurkan dalam tata kelola perusahaan sehingga dapat digunakan untuk menilai efektivitas komite audit. *Blue Ribbon Committee*, 1999 (dalam Yin *et al.*, 2012), merekomendasikan minimal empat rapat setahun untuk komite audit menjadi efektif. KPMG, 1999 (dalam Yin *et al.*, 2012), mengusulkan antara tiga dan empat rapat dalam satu tahun, sedangkan PwC, 1993 (dalam Yin *et al.*, 2012), merekomendasikan minimal empat rapat dalam setahun untuk komite audit menjadi efektif.

Efektivitas komite audit dapat dinilai dari aktifitas komite audit. Aktifitas komite audit salah satunya dapat dilihat dari frekuensi rapat komite audit. Frekuensi rapat sering dianggap dalam penelitian terdahulu sebagai proksi untuk tingkat aktifitas pengawasan (Collier dan Gregory, 1999; Vafeas, 1999; Laksana, 2008; Sharma *et al.*, 2009 dalam Greco, 2011). Mengingat pentingnya efektivitas komite audit, maka banyak penelitian mencoba untuk mengetahui

faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Penelitian Greco (2011) menganalisis faktor penentu frekuensi rapat komite audit, dimana dalam penelitian tersebut menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat komite audit di perusahaan Italia. Faktor-faktor tersebut meliputi konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan (*Insider Ownership*), ukuran dewan direksi, dualitas CEO, proporsi komisaris independen, dan keberadaan komisaris independen sebagai ketua. Pada penelitian Greco (2011) tersebut memasukkan variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, *leverage*, umur perusahaan, dan kinerja perusahaan pada periode sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Greco (2011) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan, dualitas CEO, keberadaan komisaris independen sebagai ketua, *leverage*, kinerja perusahaan pada periode sebelumnya dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit. Sementara proporsi komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit.

Struktur kepemilikan dianggap sebagai penentu utama kegiatan komisaris (Greco, 2011). Dalam suatu kondisi yang digambarkan oleh konsentrasi kepemilikan pihak eksternal perusahaan, pemegang saham yang dominan mungkin saja mencari cara untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri dan mengambil alih kekayaan dari investor-investor lainnya (Shleifer dan Wolfenzon, 2012; Dyck dan Zingales, 2004 dalam Greco, 2011). Dalam situasi ini, konflik agensi terdapat antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa pengendalian

kepemilikan saham mayoritas memiliki dampak negatif pada frekuensi rapat komite audit (Mendez dan Garcia, 2007 dalam Greco, 2011). Akan tetapi, penelitian Greco (2011) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit.

Teori agensi berpendapat bahwa kepemilikan oleh manajemen adalah dua sisi yang mempengaruhi biaya agen (Jensen dan Meckling, 1976; Shleifer dan Vishny, 1997). Ada dua pengaruh kepemilikan oleh pihak internal perusahaan. Pertama, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan dapat menyelaraskan manajemen dan kepentingan pemegang saham. Kedua, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan dapat mengurangi biaya agensi. Kepemilikan oleh pihak internal perusahaan dapat diartikan sebagai pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan oleh pihak internal perusahaan dapat menggantikan mekanisme pengawasan lainnya (Leftwich *et al.*, 1981; Fama dan Jensen, 1983 dalam Greco, 2011). Namun demikian, penelitian yang lain menemukan bahwa kepemilikan oleh pihak internal perusahaan berdampak negatif pada frekuensi rapat komite audit (Mendez dan Garcia, 2007 dalam Greco, 2011). Hal ini terjadi karena kepemilikan oleh pihak internal perusahaan dapat memberikan pengawasan langsung ke akses informasi perusahaan.

Faktor penting lainnya yang dianggap mempengaruhi aktifitas komite audit adalah ukuran dewan komisaris. Ukuran dewan yang lebih besar memberikan akses ke sumber daya yang lebih besar dan bakat manajerial yang lebih tinggi, sehingga memberikan pengawasan yang lebih efektif. Penelitian

Adelopo *et al.* (2012), menunjukkan hubungan positif antara ukuran dewan dengan aktifitas komite audit meskipun tidak signifikan. Akan tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Greco (2011) dan Yin *et al.* (2012) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat komite audit.

Proporsi komisaris independen pada dewan komisaris berkontribusi untuk meningkatkan pengawasan perusahaan (Carcello *et al.*, 2002 dalam Greco, 2011). Vafeas, 1999 (dalam Greco, 2011) berpendapat bahwa komisaris independen cenderung menuntut rapat dewan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk mengawasi manajemen. Komisaris independen dapat menuntut pengawasan internal yang lebih besar atas proses pelaporan keuangan untuk melindungi reputasi mereka. Oleh sebab itu, tuntutan ini yang mengakibatkan rapat komite audit lebih sering diadakan dalam perusahaan. Namun demikian, penelitian Yin *et al.* (2012) menemukan bahwa proporsi komisaris independen berhubungan negatif dengan frekuensi rapat komite audit.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat *research gap* yaitu adanya perbedaan hasil penelitian pada penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian Yin *et al.* (2012) menemukan bahwa proporsi saham yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas, proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris, proporsi komisaris yang memiliki kompetensi, *leverage*, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap frekuensi rapat komite audit, sedangkan ukuran perusahaan dan komite audit berhubungan positif dengan frekuensi rapat komite audit. Penelitian Adelopo *et al.* (2012) menemukan bahwa proporsi

komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, dan struktur kepemilikan berpengaruh terhadap aktifitas komite audit. Namun, jumlah dewan komisaris, kehadiran ahli keuangan di komite audit, jumlah komisaris independen dalam komite audit, dan piagam komite audit tidak berpengaruh terhadap aktifitas komite audit.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Restria dan Cahyonowati (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Restria dan Cahyonowati (2014) adalah pada penelitian tersebut menguji faktor-faktor yang mempengaruhi aktifitas pengawasan dewan komisaris. Aktifitas pengawasan dewan komisaris diproksikan dengan frekuensi rapat dewan komisaris. Pengukuran variabel aktifitas pengawasan dewan komisaris adalah jumlah frekuensi rapat dewan komisaris pada periode tahun 2011 (Restria dan Cahyonowati, 2014). Berdasarkan *research gap* tersebut, maka dilakukan penelitian kembali untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh faktor-faktor yang menentukan frekuensi rapat komite audit karena hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya masih beragam.

Penelitian ini mengacu pada penelitian serupa yang dilakukan oleh Greco (2011) dalam lingkup perusahaan di Italia. Variabel dependen pada penelitian Greco (2011) adalah frekuensi rapat dewan komisaris dan frekuensi rapat komite audit. Penelitian tersebut menggunakan variabel struktur kepemilikan yang terdiri atas konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan oleh pihak internal perusahaan (*Insider Ownership*). Variabel independen lainnya meliputi ukuran dewan direksi, dualitas CEO, proporsi komisaris independen, dan keberadaan komisaris independen sebagai ketua. Terdapat juga variabel kontrol seperti ukuran

perusahaan, *leverage*, umur perusahaan dan kinerja perusahaan pada periode sebelumnya. Pada penelitian Greco (2011) tersebut, perusahaan perbankan tidak termasuk ke dalam sampel penelitian karena memiliki struktur *Good Corporate Governance* (GCG) yang berbeda dengan perusahaan pada umumnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Greco (2011) adalah penelitian ini hanya menguji pengaruh konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen terhadap frekuensi rapat komite audit. Karena ruang lingkup aktifitas pengawasan komite audit lebih spesifik kepada laporan keuangan dan pengendalian internal. Selain itu, dewan direksi pada penelitian Greco (2011) digantikan dengan dewan komisaris pada penelitian ini. Karena kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two-tier board system*) dimana dewan komisaris tidak dapat bertindak selaku dewan direksi. Penelitian ini menggunakan kembali variabel-variabel independen dan variabel kontrol dari penelitian yang dilakukan oleh Greco (2011) kecuali dualitas CEO dan keberadaan komisaris independen sebagai ketua.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan keuangan tidak termasuk ke dalam sampel penelitian karena memiliki aturan atau regulasi yang berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan periode penelitian tahun 2013 dengan alasan untuk memperoleh gambaran terkini atas objek penelitian.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali apakah aktifitas komite audit yang dinilai dari frekuensi rapat komite audit dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen. Penelitian ini perlu dilakukan karena penelitian yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat komite audit di Indonesia masih menunjukkan hasil yang beragam. Berdasarkan uraian tersebut, maka secara spesifik rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disajikan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit?
2. Apakah kepemilikan oleh pihak internal perusahaan (*Insider Ownership*) berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit?
4. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit?

## 1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Pada bagian tujuan penelitian mengungkapkan hasil yang ingin dicapai pada penelitian ini. Pada bagian kegunaan penelitian menjelaskan kegunaan penelitian ini untuk penyelesaian masalah secara operasional dan kebijakan.

## 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara rinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap frekuensi rapat komite audit.
2. Menganalisis pengaruh kepemilikan oleh pihak internal perusahaan (*Insider Ownership*) terhadap frekuensi rapat komite audit.
3. Menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap frekuensi rapat komite audit.
4. Menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen terhadap frekuensi rapat komite audit.

## 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Teoritis

Memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat komite audit. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian teoritis dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi regulator. Penelitian ini dapat sebagai masukan bagi pengembangan aturan mengenai pengawasan maupun pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik oleh komite audit.

- b. Bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan mendorong pihak perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaannya dengan adanya aktifitas komite audit yang salah satunya dilihat dari frekuensi rapat komite audit dalam setahun.
- c. Bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat komite audit.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang alasan mengapa topik faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat komite audit perlu dibahas. Selain itu, juga akan dijelaskan mengenai rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi.

##### **BAB II TELAAH PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang landasan teori yang mendasari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit. Selain itu, akan dijelaskan tentang hasil penelitian - penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel yang digunakan pada penelitian yang dilakukan dalam mencari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi rapat komite audit. Pada bab ini dijelaskan juga tentang populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, hasil analisis data dan perhitungan statistik, serta pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini menggunakan teori agensi sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena penelitian. Dalam bagian ini juga akan dibahas *Corporate Governance* sebagai mekanisme untuk mengurangi masalah agensi khususnya mengenai peran komite audit dan struktur kepemilikan. Selain itu juga akan dibahas mengenai penelitian terdahulu.

##### **2.1.1 Teori Agensi**

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen dengan prinsipal. Prinsipal merupakan pihak yang memberi wewenang, sedangkan agen merupakan pihak yang menerima wewenang dalam bentuk kontrak kerja sama. Pihak agen membuat kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi prinsipal, sementara pihak prinsipal membuat kontrak untuk memberi imbalan pada pihak agen (Hendriksen dan Van Breda, 2001). Di dalam perusahaan, pihak prinsipal dianalogikan sebagai pemilik atau pemegang saham dan pihak agen adalah sebagai manajer perusahaan.

Dalam teori ini dijelaskan bahwa baik prinsipal maupun agen, masing-masing memiliki motif pribadi. Prinsipal mendelegasikan pengambilan keputusan kepada agen. Tetapi agen tidak selalu bertindak sesuai keinginan atau harapan

prinsipal. Prinsipal mengharapkan return yang maksimal, sedangkan agen juga memiliki keinginan untuk memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri.

Pihak manajemen yang seharusnya melakukan tindakan yang selaras dengan kepentingan pemegang saham, dalam hal tertentu dapat bertindak untuk kepentingan diri sendiri sehingga menimbulkan *agency problems*. *Agency problem* ini terjadi karena adanya informasi yang tidak lengkap atau biasa disebut sebagai asimetri informasi. Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan permasalahan yang terkait asimetri informasi antara lain:

1. *Moral hazard*, yaitu permasalahan yang timbul apabila agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. *Adverse selection*, yaitu kesalahan dalam pengambilan keputusan yang disebabkan oleh asimetri informasi, yaitu informasi yang tidak lengkap, keadaan dimana tidak semua informasi diketahui oleh kedua belah pihak.

*Agency problem* berdampak pada pengendalian dan pengendalian dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang menyebabkan para manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan. Masalah tersebut dapat diminimalkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan antara agen dan prinsipal. Namun, dengan munculnya mekanisme pengawasan akan menimbulkan biaya yang disebut biaya agensi. Menurut Jensen dan Meckling (1976), terdapat tiga jenis biaya agensi yaitu:

1. Biaya pengawasan (*monitoring cost*) adalah biaya yang dikeluarkan karena melakukan pengawasan terhadap aktifitas-aktifitas agen yang dilakukan oleh prinsipal.

2. Biaya bonding (*bonding cost*) adalah biaya yang menjamin bahwa agen tidak akan bertindak sesuatu yang merugikan prinsipal.
3. Biaya kerugian residual (*residual loss*) adalah pengurangan kemakmuran yang dialami oleh prinsipal akibat perbedaan kepentingan dengan agen.

Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, dewan komisaris bertindak sebagai pengendali internal tertinggi yang bertugas untuk mengawasi kegiatan manajemen. Dalam menjalankan tugas tersebut, dewan komisaris membentuk komite audit untuk membantu tugasnya sebagai pengawas perusahaan. Komite audit merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan memantau proses pelaporan keuangan perusahaan, pengendalian internal, dan audit eksternal. Komite audit berwenang dalam mengawasi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Dengan adanya komite audit, maka pengawasan terhadap manajemen akan meningkat sehingga diharapkan dapat mengatasi munculnya asimetri informasi.

### **2.1.2 *Good Corporate Governance***

Banyak perusahaan yang telah mengalami kegagalan karena tidak mengimplementasikan *Good Corporate Governance*. Saat ini pelaksanaan *Good Corporate Governance* menjadi perhatian khusus bagi perusahaan yang ingin menjaga kelangsungan usahanya.

*Corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur,

pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (Utama, 2004).

Menurut KNKG (2006), prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* yaitu:

1. Transparansi (*transparancy*), mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, diakses oleh pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), mengandung unsur kejelasan fungsi, struktur, sistem, pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.
4. Independensi (*independency*), artinya suatu keadaan dimana perusahaan terbebas dari pengaruh-pengaruh tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, dewan komisaris dan direksi terbebas dari tekanan dari pihak manapun termasuk pembuat peraturan.
5. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*), mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya.

Mekanisme *Corporate Governance* dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu mekanisme internal dan eksternal (Lins dan Warnock, 2004).

Mekanisme internal dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti RUPS, komposisi dewan direksi dan dewan komisaris, dan pertemuan dengan dewan direksi. Mekanisme eksternal seperti pemegang saham pihak eksternal, aturan hukum, dan pasar untuk mengendalikan perusahaan (Lins dan Warnock, 2004). Dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, maka salah satu mekanisme *Good Corporate Governance* yang dilakukan adalah dengan membentuk komite audit yang bertugas untuk membantu tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dalam mengawasi perusahaan. Komite audit termasuk dalam mekanisme internal *Corporate Governance*. Oleh karena itu, keberadaan komite audit sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik.

### **2.1.3 Komite Audit**

Di Indonesia, keberadaan komite audit dalam perusahaan publik diatur dalam Peraturan Nomor IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang *Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. Keberadaan komite audit diwajibkan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia untuk mewujudkan *Good Corporate Governance*.

Menurut Peraturan Nomor IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BL/2012, pengertian komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsi dewan komisaris.

Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) paling kurang memuat:

1. Tugas dan tanggung jawab serta wewenang
2. Komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan
3. Tata cara dan prosedur kerja
4. Kebijakan penyelenggaraan rapat
5. Sistem pelaporan kegiatan
6. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan
7. Masa tugas komite audit

Menurut Peraturan Nomor IX.I.5, dalam menjalankan fungsinya, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*.

5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan perusahaan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan.

Selain itu komite audit juga mempunyai wewenang yang diatur dalam peraturan tersebut yaitu:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris.

### **2.1.3.1 Aktifitas Komite Audit**

Salah satu aktifitas rutin yang dilakukan komite audit dalam pelaksanaan tugasnya adalah melakukan pertemuan secara formal antar anggota komite audit, dewan komisaris, dewan direksi, maupun auditor eksternal (Rustiarini, 2012). Komite audit dapat mengadakan rapat secara periodik sebagaimana ditetapkan oleh komite audit sendiri. Menurut Peraturan Nomor IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BL/2012, komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan. Rapat komite audit hanya dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari  $1 / 2$  (satu per dua) jumlah anggota. Keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris.

### **2.1.4 Struktur Kepemilikan**

Teori agensi menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan yang tinggi akan menghasilkan insentif yang tinggi. Masalah keagenan antara pemegang saham dan manajer akan berkurang oleh pengawasan pemegang saham mayoritas dan pemantauan perilaku manajer (Yin *et al.*, 2012). Struktur kepemilikan dianggap sebagai penentu utama kegiatan komisaris. Dalam teori agensi yang menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan dan pemegang saham internal perusahaan dapat mengambil keuntungan pribadi dan menikmati akses langsung ke informasi

perusahaan (Shleifer dan Vishny, 1997; Dyck dan Zingales, 2004, dalam Greco, 2011).

Struktur kepemilikan dapat dibedakan menurut jenis dan identitasnya. Menurut jenis struktur kepemilikan adalah konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan yang menyebar. Penelitian Greco (2011) menggunakan konsentrasi kepemilikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat komite audit. Menurut identitasnya struktur kepemilikan antara lain meliputi kepemilikan oleh pihak internal perusahaan (*Insider Ownership*) atau kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Penelitian Greco (2011) menggunakan kepemilikan oleh pihak internal perusahaan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat komite audit. Sedangkan penelitian Adelopo *et al.* (2012) kepemilikan institusional sebagai salah satu faktor dalam menentukan frekuensi rapat komite audit.

#### **2.1.4.1 Konsentrasi Kepemilikan**

Konsentrasi kepemilikan merupakan kondisi dimana pemegang saham memiliki jumlah saham yang besar dan total persentase saham yang dimiliki para pemegang saham dari saham perusahaan. Kepemilikan perusahaan akan terkonsentrasi apabila saham yang dimiliki seorang investor semakin besar. Dengan saham mayoritas yang dimiliki oleh investor, semakin besar pula insentif pemilik perusahaan untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan - tindakan manajerial. Aktifitas pengawasan biasanya dilakukan oleh dewan komisaris, dimana dewan komisaris dipilih oleh pemegang saham mayoritas melalui Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bertugas untuk melindungi kepentingan para pemegang saham dengan mengawasi manajerial (Wijaya, 2013).

Keberadaan pemegang saham mayoritas menjadi cara yang efektif untuk meredakan konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (Yin *et al.*, 2012). Pemegang saham mayoritas berharap komite audit untuk dapat berperan aktif sebagai pengawas. Akibatnya komite audit akan semakin meningkatkan aktifitasnya. Pemegang saham mayoritas akan bertindak untuk kepentingan pribadi sehingga bisa merugikan pemegang saham minoritas.

#### **2.1.4.2 Kepemilikan oleh Pihak Internal Perusahaan (*Insider Ownership*)**

Kepemilikan oleh pihak internal perusahaan merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajerial perusahaan. Kepemilikan ini merupakan konsekuensi adanya kompensasi kepemilikan saham yang diberikan oleh perusahaan untuk manajemen.

Kepemilikan perusahaan oleh manajer merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipertimbangkan dalam perusahaan. Kepemilikan oleh manajer akan mempengaruhi kinerja manajemen, sehingga mereka akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan karena adanya rasa memiliki perusahaan.

Kepemilikan oleh manajemen dapat mengurangi biaya agensi karena hal tersebut dapat memotivasi manajemen untuk bertindak seperti pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Greco (2011), kepemilikan oleh pihak internal perusahaan dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang

saham serta dapat mengurangi biaya agensi. Oleh sebab itu, kepemilikan ini dapat menggantikan mekanisme pengawasan lainnya.

### **2.1.5 Ukuran Dewan Komisaris**

Karakteristik komisaris dan CEO mungkin sebagai penentu rapat komisaris. Salah satu faktor penting yang dianggap mempengaruhi aktifitas komisaris adalah ukuran komisaris (Greco, 2011). Ukuran dewan komisaris dilihat dari jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002, komposisi dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen. Jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan (KNKG, 2006).

Ukuran dewan memungkinkan untuk mempengaruhi frekuensi rapat komite audit (Raghunandan dan Rama, 2007). Ukuran dewan yang lebih besar memberikan akses ke sumber daya yang lebih besar dan bakat manajerial yang lebih tinggi, sehingga memberikan pemantauan yang lebih efektif. Sebaliknya, ukuran yang lebih besar kemungkinan adalah bentuk tata kelola perusahaan yang tidak efisien, sehingga menyebabkan frekuensi rapat komite audit akan lebih sering (Vafeas, 1999).

### 2.1.6 Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan karyawan atau orang yang berurusan langsung dengan perusahaan tersebut dan tidak mewakili pemegang saham. Komisaris independen tidak mewakili pemegang saham minoritas, tetapi keberadaannya dapat melindungi pemegang saham minoritas. Literatur akademis secara luas mengakui bahwa proporsi komisaris independen pada dewan berkontribusi untuk meningkatkan pemantauan dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau perundang-undangan (Carcello *et al.*, 2002 dalam Greco, 2011). Menurut Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00001/BEI/01-2014, calon perusahaan tercatat yang akan mencatatkan saham di Papan Utama maupun di Papan Pengembangan wajib memiliki komisaris independen berjumlah paling kurang 30% dari jajaran anggota dewan komisaris.

Menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BL/2012, komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama perusahaan.

4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

### **2.1.7 Penelitian Terdahulu**

Greco (2011) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat dewan dan komite audit secara bersamaan di Italia tahun 2007. Variabel independen dalam penelitian tersebut antara lain kepemilikan yang terkonsentrasi, *Insider Ownership*, ukuran dewan, dualitas CEO, proporsi komisaris independen, dan keberadaan komisaris independen sebagai ketua. Hasil penelitian Greco menunjukkan bahwa kepemilikan oleh pihak internal perusahaan berpengaruh negatif terhadap frekuensi rapat baik dewan maupun komite audit sedangkan proporsi komisaris independen dalam dewan memiliki dampak positif. Hasil lainnya menunjukkan bahwa komite audit lebih aktif di perusahaan yang lebih besar. Namun, konsentrasi kepemilikan, dualitas CEO, keberadaan komisaris independen sebagai ketua, dan ukuran direksi tidak berpengaruh secara signifikan.

Yin *et al.* (2012) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat komite audit di China. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi saham yang dipegang oleh pemegang saham mayoritas dan sifat dasar dari pemegang saham mayoritas apakah dipegang oleh pemerintah atau swasta, karakteristik dari komite audit dan dewan, serta karakteristik keuangan perusahaan dan eksternal auditor. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 912 perusahaan di China mulai tahun 2007-2010. Hasil penelitiannya adalah frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif dengan proporsi saham

yang dimiliki pemegang saham mayoritas dan lebih sedikit dalam perusahaan yang dimiliki pemerintah dibandingkan milik swasta. Ukuran perusahaan dan komite audit berhubungan positif dengan frekuensi rapat komite audit. Namun, terdapat pengaruh negatif dari proporsi komisaris independen dalam dewan direksi terhadap frekuensi rapat komite audit.

Adelopo *et al.* (2012) melakukan penelitian terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek London pada tahun 2006 tentang faktor penentu aktifitas komite audit di Inggris. Variabel dalam penelitian tersebut meliputi jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, keahlian anggota komite audit, piagam komite audit, ukuran komite audit, dan struktur kepemilikan. Selain itu, pada penelitian tersebut menggunakan ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, dan profitabilitas sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, dan struktur kepemilikan berpengaruh terhadap aktifitas komite audit. Namun, jumlah dewan komisaris, kehadiran ahli keuangan di komite audit, jumlah komisaris independen dalam komite audit, dan piagam komite audit tidak berpengaruh terhadap aktifitas komite audit.

Restria dan Cahyonowati (2014) melakukan penelitian terhadap perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011. Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi aktifitas pengawasan dewan komisaris pada perusahaan *go public* di Indonesia. Faktor-faktor yang diuji antara lain konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan *size*. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dan *size* berpengaruh signifikan dalam menentukan frekuensi rapat dewan komisaris, sedangkan konsentrasi kepemilikan dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan. Penelitian-penelitian terdahulu secara ringkas disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti dan Tahun</b>	<b>Variabel dan Sampel</b>	<b>Teknik Analisis</b>	<b>Hasil</b>
Greco (2011)	<p>Variabel dependen: frekuensi rapat komite audit</p> <p>Variabel independen: kepemilikan yang terkonsentrasi, <i>Insider Ownership</i>, ukuran dewan, dualitas CEO, proporsi komisaris independen, dan keberadaan komisaris independen sebagai ketua</p> <p>Sampel: perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Italian Stock Exchange</p>	Regresi binomial negatif	Proporsi komisaris independen, ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit
Yin <i>et al.</i> (2012)	<p>Variable dependen: frekuensi rapat komite audit</p> <p>Variabel independen: proporsi saham</p>	Regresi berganda	Proporsi saham yang dimiliki pemegang saham mayoritas, kompetensi komite audit, <i>leverage</i> , dan pertumbuhan berpengaruh negatif

	<p>yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas dan sifat dasar dari pemegang saham mayoritas apakah dipegang oleh pemerintah atau swasta, ukuran komite audit, kompetensi komite audit, dualitas CEO, ukuran dewan, auditor eksternal, ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, profitabilitas, dan pertumbuhan</p> <p>Sampel: semua perusahaan yang terdaftar di Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges</p>		<p>terhadap frekuensi rapat komite audit, sedangkan ukuran komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap frekuensi rapat komite audit.</p>
Adelopo <i>et al.</i> (2012)	<p>Variabel dependen: aktifitas komite audit (frekuensi rapat komite audit)</p> <p>Variabel independen: jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, keahlian anggota komite audit, piagam komite audit, ukuran komite audit, dan struktur kepemilikan</p>	Regresi berganda	<p>Proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, dan struktur kepemilikan berpengaruh terhadap aktifitas komite audit.</p>

Restria dan Cahyonowati (2014)	<p>Variabel dependen: frekuensi rapat dewan komisaris</p> <p>Variabel independen: konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan <i>size</i>.</p> <p>Sampel: perusahaan non-perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia</p>	Regresi berganda	Kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dan <i>size</i> berpengaruh signifikan dalam menentukan frekuensi rapat dewan komisaris
--------------------------------	--	------------------	---

Sumber: Data diringkas dari berbagai jurnal, 2015

## 2.2 Kerangka Pemikiran

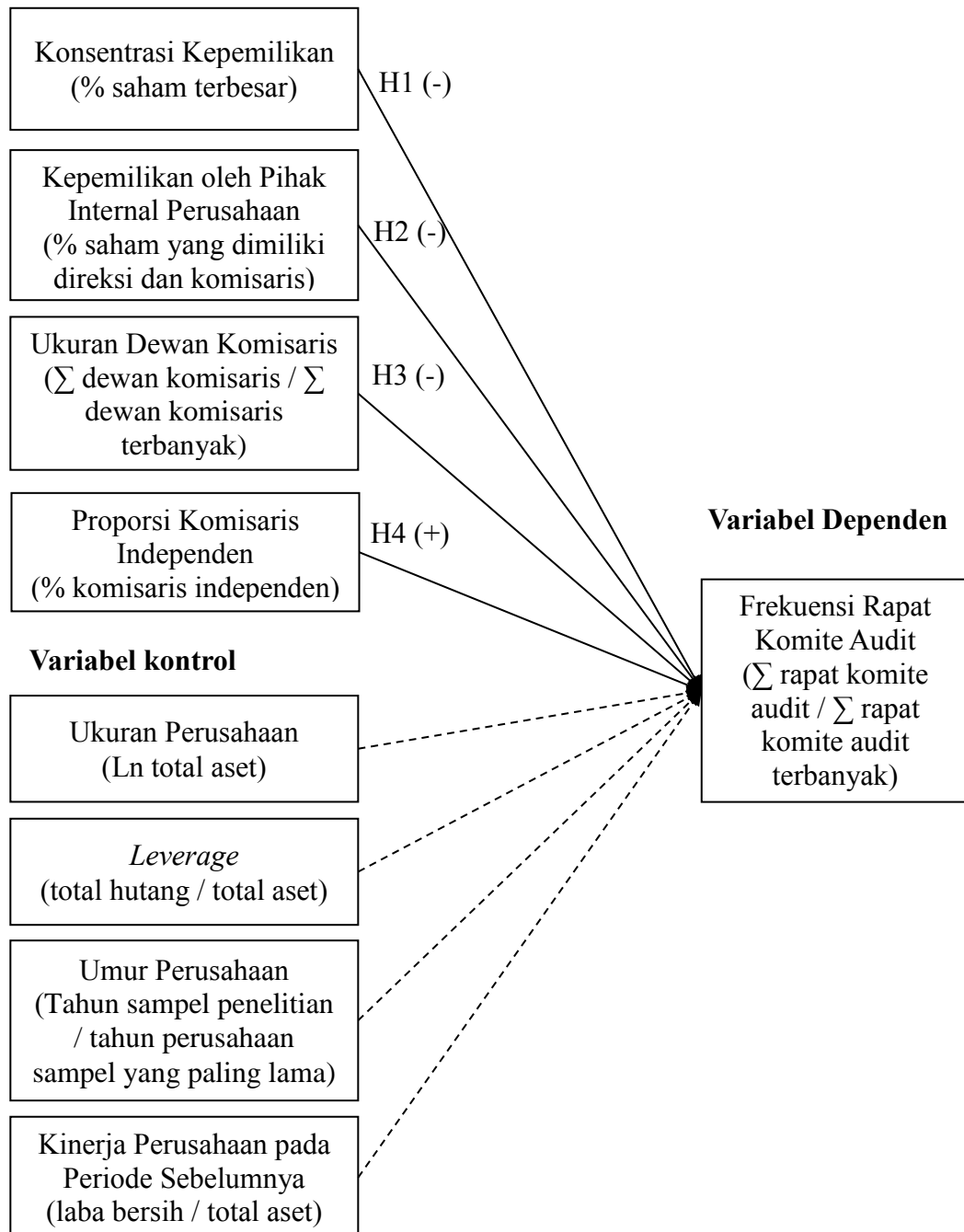
Lemahnya efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* merupakan kunci kebangkrutan sebuah perusahaan besar. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan *Good Corporate Governance*, maka dewan komisaris diwajibkan untuk membentuk komite audit. Komite audit yang efektif dapat membantu meningkatkan transparansi di pasar sekuritas, menghasilkan perlindungan yang lebih baik dari pemegang saham, dan peningkatan nilai perusahaan (McMullen dan Raghunandam, 1996; Pwc, 1999; DeZoort *et al.*, 2002 dalam Yin *et al.*, 2012). Dalam melakukan aktifitas, komite audit dapat mengadakan rapat secara periodik sesuai komitmen waktu yang telah ditetapkan oleh komite audit sendiri. Oleh karena itu, jika frekuensi rapat komite audit meningkat, maka diharapkan dapat meningkatkan efektivitas komite audit.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat komite audit. Faktor-faktor yang diteliti adalah konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen. Selain itu digunakan juga ukuran perusahaan, *leverage*, umur perusahaan, dan kinerja perusahaan pada periode sebelumnya sebagai variabel kontrol. Konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan, dan ukuran dewan komisaris diduga berpengaruh negatif terhadap frekuensi rapat komite audit. Sedangkan proporsi komisaris independen diduga mempunyai pengaruh positif terhadap frekuensi rapat komite audit. Gambar yang menunjukkan hubungan antar variabel adalah sebagai berikut (gambar 2.1):

Gambar 2.1

## Kerangka Pemikiran

## Variabel Independen



Sumber: Kerangka pemikiran penelitian ini dikembangkan oleh penulis sendiri berdasarkan pada penelitian Greco (2011).

## **2.3 Hipotesis**

Hipotesis dari penelitian yang akan disajikan berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai diuraikan sebagai berikut:

### **2.3.1 Konsentrasi Kepemilikan dan Frekuensi Rapat Komite Audit**

Pemegang saham mayoritas memiliki insentif untuk mengawasi secara ketat terhadap manajemen dan menuntut mekanisme yang efektif dalam memastikan tata kelola perusahaan dilaksanakan (Leftwich *et al.*, 1981; Shleifer dan Vishny, 1997; dalam Greco, 2011). Teori agensi menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan yang tinggi akan menghasilkan insentif untuk mengambil atau mendapatkan keuntungan pribadi. Masalah agensi antara pemegang saham dan manajer akan berkurang oleh pengawasan pemegang saham mayoritas dan pemantauan perilaku manajer (Yin *et al.*, 2012). Shleifer dan Vishny (1986) dan Mendez dan Garcia (2007) dalam Yin *et al.* (2012), berpendapat bahwa ketika kepemilikan saham relatif terkonsentrasi, pemegang saham mayoritas memiliki motivasi yang kuat untuk mengawasi manajer perusahaan karena klaim mereka untuk laba lebih besar. Pemegang saham mayoritas berharap komite audit untuk bekerja lebih tekun serta berperan aktif sebagai pengawas. Hasil penelitian Mendez dan Garcia (2007) dalam Greco (2011) mengungkapkan bahwa pengendalian para pemegang saham mayoritas mempunyai hubungan negatif dengan frekuensi rapat komite audit. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka diprediksikan konsentrasi kepemilikan mempunyai pengaruh negatif dengan frekuensi rapat komite audit.

H1 : Konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap frekuensi rapat komite audit.

### **2.3.2 Kepemilikan oleh Pihak Internal Perusahaan dan Frekuensi Rapat Komite Audit**

Teori agensi menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham sebagai akibat dari pemisahan kepemilikan dan manajemen. Terdapat dua pengaruh kepemilikan oleh pihak internal perusahaan yaitu dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham serta untuk mengurangi biaya agensi (Greco, 2011). Tingginya tingkat keselarasan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham mayoritas diharapkan dapat mengurangi biaya agensi (Greco, 2011). Kepemilikan oleh manajemen mengurangi biaya agensi karena kepemilikan saham dalam perusahaan akan memotivasi manajemen untuk berperilaku seperti pemegang saham. Hal ini akan berdampak pada menurunnya asimetri informasi karena manajer sebagai pemegang saham secara langsung turut serta dalam aktifitas operasional dan pengawasan perusahaan. *Insider ownership* ditemukan berhubungan negatif dengan frekuensi rapat komite audit (Mendez dan Garcia, 2007 dalam Greco, 2011). Dengan meningkatnya kepemilikan oleh pihak internal perusahaan, maka diprediksi akan menurunkan jumlah frekuensi rapat komite audit karena menurunnya kebutuhan pengawasan yang dilakukan oleh komite audit. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka diprediksikan kepemilikan oleh pihak internal perusahaan mempunyai pengaruh negatif dengan frekuensi rapat komite audit.

H2 : Kepemilikan oleh pihak internal perusahaan berpengaruh negatif terhadap frekuensi rapat komite audit.

### **2.3.3 Ukuran Dewan Komisaris dan Frekuensi Rapat Komite Audit**

Salah satu faktor penting yang dianggap mempengaruhi aktifitas dewan komisaris adalah ukuran dewan komisaris (Greco, 2011). Ukuran dewan yang lebih besar kemungkinan adalah bentuk *Good Corporate Governance* yang tidak efisien karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, sehingga menyebabkan frekuensi rapat komite audit akan lebih sering (Vafeas, 1999). Jumlah anggota dewan yang lebih banyak bisa menyebabkan keragaman perspektif yang lebih nyata dalam diskusi. Namun demikian, ukuran dewan komisaris yang meningkat, dapat juga menyebabkan penurunan aktifitas komite audit (Greco, 2011). Jumlah dewan komisaris yang lebih besar akan menyebabkan berkurangnya jumlah frekuensi rapat komite audit, karena ukuran dewan yang besar memberi akses sumber daya dan bakat manjerial yang tinggi. Hal tersebut akan meningkatkan efektifitas pemantauan oleh dewan komisaris. Berdasarkan hal tersebut maka diprediksikan ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh negatif dengan frekuensi rapat komite audit.

H3 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap frekuensi rapat komite audit.

### **2.3.4 Proporsi Komisaris Independen dan Frekuensi Rapat Komite Audit**

Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris yang independen dapat memberikan pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Vafeas, 1999 (dalam Greco, 2011) berpendapat bahwa komisaris independen cenderung menuntut frekuensi rapat dewan komisaris yang lebih banyak untuk meningkatkan efektivitas dewan komisaris dalam mengawasi manajemen. Komisaris independen dapat menuntut pengawasan internal yang lebih besar atas proses pelaporan keuangan untuk melindungi reputasi mereka. Tuntutan ini dapat mengakibatkan komite audit lebih sering mengadakan rapat. Menon dan Williams, 1994 (dalam Greco, 2011) menemukan bahwa dalam sampel perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, aktifitas komite audit secara positif terkait dengan proporsi komisaris independen. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen pada komposisi anggota dewan komisaris, maka akan semakin sering komite audit mengadakan rapat. Berdasarkan hal tersebut maka diprediksikan proporsi komisaris independen mempunyai pengaruh positif terhadap frekuensi rapat komite audit.

H4 : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap  
frekuensi rapat komite audit.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah karakteristik yang nilai datanya bervariasi dari satu pengukuran ke pengukuran lainnya. Untuk menguji hipotesis yang diajukan, variabel yang diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah frekuensi rapat komite audit. Variabel independen penelitian ini meliputi konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh pihak internal perusahaan (*Insider Ownership*), ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen. Variabel kontrol meliputi ukuran perusahaan, *leverage*, umur perusahaan, dan kinerja perusahaan pada periode sebelumnya. Ringkasan variabel penelitian, dimensi, indikator, dan skala pengukuran disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Variabel, Dimensi, Indikator, dan Skala Pengukuran**

Variabel Penelitian	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Frekuensi Rapat Komite Audit (Y)	Diproksikan dengan jumlah rapat komite audit yang diadakan selama tahun 2013 (Greco, 2011)	Jumlah rapat komite audit dibagi jumlah rapat komite audit terbanyak	Interval
Konsentrasi Kepemilikan (X1)	Diproksikan dengan persentase	% saham terbesar di dalam perusahaan	Rasio

	saham terbesar yang dimiliki investor (Greco, 2011)		
Kepemilikan oleh Pihak Internal Perusahaan (X2)	Diproksikan dengan persentase saham yang dimiliki dewan komisaris dan direksi (Greco, 2011)	% saham yang dimiliki komisaris dan direksi	Rasio
Ukuran Dewan Komisaris (X3)	Diproksikan dengan jumlah anggota dewan komisaris (Greco, 2011)	Jumlah anggota dewan komisaris dibagi jumlah anggota dewan komisaris terbanyak	Interval
Proporsi Komisaris Independen (X4)	Diproksikan dengan perbandingan antara jumlah komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris (Greco, 2011)	$\frac{\sum \text{komisaris independen}}{\sum \text{dewan komisaris}}$	Rasio
Ukuran Perusahaan	Diproksikan dengan logaritma natural dari total aset perusahaan (Greco, 2011)	Ln Total Aset	Interval
<i>Leverage</i>	Diproksikan dengan rasio total hutang terhadap total aset (Greco, 2011)	$\frac{\text{total hutang}}{\text{total aset}}$	Rasio
Umur	Diproksikan	Tahun sampel	Interval

Perusahaan	dengan jumlah tahun sejak perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Greco, 2011)	penelitian – tahun perusahaan <i>go public</i> dibagi tahun perusahaan sampel yang paling lama <i>go public</i>	
Kinerja perusahaan periode sebelumnya	Diprosikan dengan ROA yaitu rasio laba bersih tahun 2012 terhadap total aset tahun 2012 (Greco, 2011)	$\frac{\text{laba bersih}}{\text{total aset}}$	Rasio

Sumber: Data diringkas dari pengukuran variabel penelitian, 2015

### 3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah frekuensi rapat komite audit (Greco, 2011). Pada penelitian ini, pengukuran variabel ini diukur melalui jumlah rapat komite audit dibagi jumlah rapat komite audit terbanyak. Oleh sebab itu, variabel frekuensi rapat komite audit menggunakan data matrik dengan skala pengukuran interval.

### 3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh

pihak internal perusahaan (*Insider Ownership*), ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen.

### **3.1.2.1 Konsentrasi Kepemilikan**

Konsentrasi kepemilikan terjadi jika terdapat seorang atau beberapa orang investor yang menguasai secara signifikan saham yang beredar dari suatu perusahaan. Pengukuran variabel konsentrasi kepemilikan dalam penelitian ini adalah persentase saham terbesar yang dimiliki oleh seorang investor di dalam perusahaan (Greco, 2011; Restria dan Cahyonowati, 2014). Oleh sebab itu, variabel konsentrasi kepemilikan menggunakan data matrik dengan skala pengukuran rasio.

### **3.1.2.2 Kepemilikan oleh Pihak Internal Perusahaan (*Insider Ownership*)**

Kepemilikan oleh pihak internal perusahaan merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajerial perusahaan. Kepemilikan oleh pihak internal perusahaan dapat juga diartikan sebagai jumlah persentase saham yang dimiliki oleh dewan komisaris dan dewan direksi suatu perusahaan, di mana mereka ikut aktif dalam pengambilan keputusan. Pengukuran variabel ini berdasarkan jumlah persentase saham biasa yang dimiliki oleh anggota dewan komisaris dan dewan direksi (Greco, 2011; Restria dan Cahyonowati, 2014; Raghunandan dan Rama, 2007). Oleh sebab itu, variabel kepemilikan oleh pihak internal perusahaan menggunakan data matrik dengan skala pengukuran rasio.

### **3.1.2.3 Ukuran Dewan Komisaris**

Karakteristik direksi dan CEO mungkin sebagai penentu rapat dewan komisaris (Greco, 2011). Salah satu faktor penting yang dianggap mempengaruhi aktifitas dewan komisaris adalah ukuran dewan komisaris. Ukuran dewan komisaris memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat. Karena ukuran yang besar memungkinkan komposisi yang lebih lengkap berkaitan dengan keahlian, independensi, dan kemampuan. Variabel ukuran dewan komisaris diukur berdasarkan jumlah anggota dewan komisaris dibagi jumlah anggota dewan komisaris terbanyak (Greco, 2011, Restria dan Cahyonowati, 2014; Raghunandan dan Rama, 2007; Yin *et al.*, 2012). Oleh sebab itu, variabel ukuran dewan komisaris menggunakan data matrik dengan skala pengukuran interval.

### **3.1.2.4 Proporsi Komisaris Independen**

Proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris berkontribusi untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan karyawan atau orang yang berurusan langsung dengan perusahaan tersebut dan tidak mewakili pemegang saham. Pengukuran variabel proporsi komisaris independen berdasarkan proporsi komisaris independen dibandingkan dengan jumlah keseluruhan komisaris (Greco, 2011; Yin *et al.*, 2012; Restria dan Cahyonowati, 2014). Oleh sebab itu, variabel proporsi komisaris independen menggunakan data matrik dengan skala pengukuran rasio.

$$\text{Proporsi komisaris independen} = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}}$$

### 3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol yang digunakan meliputi ukuran perusahaan, *leverage*, umur perusahaan, dan kinerja perusahaan pada periode sebelumnya.

#### 3.1.3.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menyatakan besar kecilnya suatu perusahaan dilihat dari banyaknya total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pengukuran variabel ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural dari total aset perusahaan (Greco, 2011; Yin *et al.*, 2012). Oleh sebab itu, variabel ukuran perusahaan menggunakan data matrik dengan skala pengukuran interval.

#### 3.1.3.2 *Leverage*

*Leverage* mengukur sejauh mana perusahaan bergantung pada utang. *Leverage* menunjukkan ketergantungan perusahaan pada kreditor. Pengukuran variabel ini berdasarkan rasio total utang terhadap total aset perusahaan (Greco, 2011; Yin *et al.*, 2012). Oleh sebab itu, variabel *leverage* menggunakan data matrik dengan skala pengukuran rasio.

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset tahun 2013}}$$

### 3.1.3.3 Umur Perusahaan

Perusahaan yang baru terdaftar di Bursa Efek mungkin membutuhkan lebih banyak aktifitas dewan komisaris dan aktifitas komite audit (Greco, 2011). Variabel umur perusahaan diukur dari tahun sampel penelitian dikurangi tahun perusahaan *go public* dibagi tahun perusahaan sampel yang paling lama *go public*. Oleh sebab itu, variabel umur perusahaan menggunakan data matrik dengan skala pengukuran interval.

### 3.1.3.4 Kinerja Perusahaan pada Periode Sebelumnya

Menurut Jensen, 1993 (dalam Greco, 2011) menyatakan bahwa di dalam perusahaan yang berfungsi dengan baik, aktifitas dewan komisaris harus dibatasi secara relatif oleh operasi rutin perusahaan. Anggota komite audit dapat menderita kerugian reputasi sebagai akibat dari melayani di komite audit pada perusahaan yang terus merugi. Hal ini dapat menciptakan insentif bagi anggota komite audit untuk mengadakan rapat lebih sering dalam upaya untuk mengembalikan keuntungan perusahaan (Adelopo *et al.*, 2011). Kinerja perusahaan menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan. Tingkat profitabilitas tersebut dapat diukur dengan rasio *Return on Asset* (ROA). Pengukuran variabel ini berdasarkan pada *Return on Asset* (ROA) pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 (Greco, 2011). Oleh sebab itu, variabel kinerja perusahaan pada periode sebelumnya menggunakan data matrik dengan skala pengukuran rasio.

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih tahun 2012}}{\text{Total Aset tahun 2012}}$$

### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel yaitu *random sampling*. Karena dengan menggunakan *random sampling*, diharapkan kriteria sampel yang diperoleh sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini adalah:

1. Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013.
2. Perusahaan yang telah menerbitkan laporan tahunan perusahaan untuk periode tahun 2013.
3. Perusahaan yang memiliki data yang lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Sesuai dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber – sumber data dokumenter berupa laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan oleh situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) yang menjadi sampel penelitian. Sedangkan metode studi pustaka dilakukan dengan mengolah literatur literatur, artikel, jurnal, dan media tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

### **3.5 Metode Analisis**

Metode analisis utama yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Sebelum dilakukan analisis regresi untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, dilakukan terlebih dahulu analisis statistik deskriptif dan dilakukan pengujian kelayakan model regresi. Berikut ini penjelasan terperinci mengenai metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini:

#### **3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi variabel-variabel dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum dan distribusi frekuensi (Ghozali,

2011). Analisis ini bertujuan untuk menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas karakteristik data yang bersangkutan.

### 3.5.2 Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda karena untuk mengetahui hubungan kausal antara lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antara variabel-variabel independen dengan frekuensi rapat komite audit. Persamaan model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$ACMEET = \alpha + \beta_1 COWN_i + \beta_2 INOWN_i + \beta_3 BCSIZE_i + \beta_4 IND_i + \beta_5 SIZE_i + \beta_6 LEV_i + \beta_7 AGE_i + \beta_8 ROA_i + \varepsilon_i$$

Dimana:

ACMEET = frekuensi rapat komite audit tahun 2013

$\alpha$  = konstanta

COWN = konsentrasi kepemilikan, persentase saham biasa yang dimiliki oleh pemilik saham terbesar

INOWN = kepemilikan pihak internal perusahaan, persentase saham biasa yang dimiliki oleh komisaris dan direksi

BCSIZE = ukuran dewan komisaris, dihitung dari jumlahnya

IND = proporsi komisaris independen per total anggota dewan komisaris

SIZE = ukuran perusahaan, diukur dengan logaritma natural dari total aset

LEV	= <i>leverage</i> , diukur dengan total utang per total aset tahun 2013
AGE	= umur perusahaan, jumlah tahun <i>listing</i>
ROA	= kinerja periode sebelumnya, diukur dengan laba bersih per total aset tahun 2012
$\varepsilon$	= error

### 3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi regresi yang bias. Pengujian yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolenieritas, dan uji heteroskedastisitas.

#### 3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau nilai residual memiliki distribusi normal agar uji statistik untuk jumlah sampel kecil hasilnya tetap valid (Ghozali, 2011). Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik.

##### 1. Analisis Grafik

Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun, cara ini dapat menyesatkan jika digunakan untuk sampel kecil. Distribusi normal akan

membentuk garis lurus diagonal dan *ploting* data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Jika distribusi variabel residual normal, maka garis yang menggambarkan variabel sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

## 2. Analisis Statistik

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah dengan uji statistik non parametrik Kolmogorov – Smirnov (K-S). Uji ini diyakini lebih akurat dari pada uji normalitas dengan grafik, karena uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan, jika tidak hati – hati secara visual akan terlihat normal (Ghozali, 2011). Uji K-S dapat dilakukan dengan membuat hipotesis:

$H_0$  : Data residual berdistribusi normal

$H_1$  : Data residual tidak berdistribusi normal

Apabila *Asymptotic Significance* lebih besar dari lima persen, maka variabel terdistribusi normal (Ghozali, 2011).

### 3.5.3.2 Uji Multikolinieritas

Tujuan dari uji multikolinieritas adalah menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolinearitas diantara variabel independen (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dalam penelitian ini dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF).

Jika nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$ , maka model regresi terdapat multikolinieritas.

### 3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan dua cara yaitu melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID dan melakukan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan persamaan regresi:

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t$$

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

### 3.5.4 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model (Ghozali, 2011). Oleh sebab itu, banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik.

### **3.5.5 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Menurut Ghozali (2011), uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05 dimana  $H_0$  adalah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusannya adalah  $H_0$  diterima jika nilai signifikansi  $> 0,05$  dan ditolak jika nilai signifikansi  $< 0,05$ .

### **3.5.6 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Menurut Ghozali (2011), uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan ketentuan:

1. Apabila signifikansi  $t < 0,05$  atau  $t < 0,10$  maka  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen.
2. Apabila signifikansi  $t > 0,05$  atau  $t > 0,10$  maka  $H_0$  diterima. Hal ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen.